



The Political Education of Novice Voters among The Students of SMAN 1 Tinambung

(Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Siswa SMAN 1 Tinambung)

Rezki Rahmawati¹, Dewi Nuraliah^{2*}, Rahmatullah³, Muhammad Yusri⁴, Ahmad Amiruddin⁵, Muhammad Iqbal Maulana⁶, Andi Muhammad Iqbal Salam⁷, Nurfadilah Nasiruddin⁸, Fitriani Handayani Razak⁹, Usri¹⁰

^{1,2*,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Sulawesi Barat, Majene

¹⁰STAIN, Majene

*e-mail: dewinuraliah.baili@gmail.com

Abstrak

Pendidikan politik pemilih pemula kepada siswa SMA merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman politik terkait pemilihan umum yang benar. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi praktek politik yang akan dilakukan siswa kedepannya. Adapun beberapa tahap yang dilakukan yaitu: 1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pemaparan materi pemilih pemula bagi siswa dan siswi; 2) *Sharing session* mengenai pendidikan politik. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode luring. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 1 Tinambung ini bertujuan agar siswa siswi dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai pemilih pemula. Hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk workshop serta *sharing session* terkait politik ini memberikan pemahaman dasar politik, literasi politik, serta praktek-praktek politik yang benar bagi siswa.

Kata kunci: literasi politik, pemilih pemula, pemilu, politik praktis

Abstract

The political education of novice voters for high school students is the first step taken to foster a correct understanding of politics related to general elections. This is considered to positively impact the political practice that students will carry out in the future. There are several stages carried out: 1) Implementation of Community Service in the form of presenting material to beginner voters for students; 2) Sharing sessions regarding political education. Implementation of activities is carried out using offline methods. The community service held at SMAN 1 Tinambung aims to enable students to participate in the 2024 general election as first-time voters actively. The results of community service in the form of workshops and sharing sessions related to politics, provide students with a basic understanding of politics, political literacy, and correct political practices.

Keywords: election, political practices, political literacy, novice voters.

PENDAHULUAN

Generasi Muda atau yang sekarang akrab dengan sebutan Gen-Z sebagai generasi *Post Milenial* atau *Information Generation (iGeneration)* adalah remaja yang terbiasa dengan keberadaan dan manfaat teknologi. Mereka terbiasa dengan kehadiran *smartphone* dan berbagai perangkatnya, sehingga generasi-Z dapat dengan mudah mengakses informasi atau berita politik dimana dan kapan saja. Gen-Z merupakan target



politik dalam menumbuhkan pemahaman terkait Pendidikan politik saat ini. Para ilmuwan politik dalam seminar LIPI (Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia) mengatakan bahwa *"Sebagian dari kemerosotan politik di Indonesia disebabkan oleh kegagalan partai-partai atau kaum sipil umumnya untuk merangsang proses kearah terwujudnya suatu sistem politik yang sehat sewaktu mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat itu..."* (Halik, 2019). Minimnya keikutsertaan generasi muda dalam pesta demokrasi politik menjadi tanda tanya besar dan permasalahan yang tentunya harus diselesaikan oleh berbagai stakeholder politik di Indonesia. Generasi muda yang kategorinya sebagai pemilih pemula adalah elemen dari warga negara yang memiliki literasi politik yang lemah (Sukmajati et al., 2014). Umumnya, pemilih pemula dalam menentukan pilihan menggunakan suara mayoritas tanpa mempertimbangkan visi dan program dari figure kandidat atau partai politik. Pemilih pemula belum memiliki kesadaran electoral dan masih belum memahami makna dan konsekuensi dari suara yang mereka berikan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Barat mencatat persentase angka pemilih pemilu di tahun 2019 dari kabupaten-kabupaten di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa tercatat persentase angka pemilih sebesar 86%, Polman 81%, Majene 90%, Mamuju 86%, Mamuju Tengah 90%, Pasangkayu 85%. Tercatat persentase angka pemilih yang terendah di kabupaten Polewali Mandar.

Untuk menghindari kemerosotan politik di Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, generasi muda wajib dibekali pendidikan politik terutama dalam mendukung pemilihan umum (Pilpres, Pilgub dan juga Pilkada) yang akan berlangsung di tahun 2024. Pendidikan politik khususnya bagi generasi muda atau Gen-Z tidak hanya dilakukan melalui media-media sosial akan tetapi dapat dilakukan dengan menjangkau secara langsung ke sekolah-sekolah agar mendapat *feedback* secara langsung terkait apa yang menjadi pertanyaan atau keresahan generasi muda memandang politik di Indonesia. Pemberitaan di media elektronik bahkan media sosial acap kali menimbulkan potensi polarisasi, misinformasi dan disinformasi menjelang pemilihan umum, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pemahaman atau pendidikan politik bagi generasi muda agar tidak bersikap apatis kedepannya akibat pemberitaan negatif system perpolitikan di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi demokrasi di Indonesia, karena melibatkan masyarakat Indonesia secara langsung untuk memilih kepala daerah bahkan kepala pemerintahan. Mengacu pada data BPS tahun 2020, Gen-Z di Indonesia berjumlah 75,4 juta jiwa dari total 270 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 27,94% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, menurut hasil rapat pleno KPU pada awal juli 2023 Gen-Z sebagai pemilih pemula memiliki suara sebanyak 46,8 juta suara atau 22,85% dari keseluruhan jumlah suara penduduk Indonesia. Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang tidak sedikit (Indra, 2023). Keikutsertaan masyarakat terutama Gen-Z sebagai pemilih pemula yang memahami cara berdemokrasi dengan benar merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pemilu. Pemilih cerdas berdemokrasi dalam modul KPU adalah ketika pemilih memahami demokrasi, kritis terhadap praktik demokrasi, dan terampil dalam memperjuangkan kepentingan politik publik (Karim, 2013).

Dalam mendorong pemilih pemula yang cerdas dibutuhkan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas literasi politik sebelum menggunakan hak pilihnya di pesta



demokrasi politik. Literasi politik berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sebuah proses politik dan juga isu-isu politik dimana mereka berpartisipasi secara aktif dan efektif sebagai warga negara baik secara langsung dan tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat pemerintah (Denver & Hands, 2009). Literasi politik yang berkualitas mempengaruhi keputusan pemilih pemula dalam menentukan pilihannya berdasarkan pengetahuan politik yang telah didapatinya melalui berbagai pertimbangan. Pendidikan politik diyakini dapat membangun semangat pemilih pemula untuk dapat aktif mencari informasi dan menumbuhkan pemikiran kritis terhadap bakal calon dan program-program yang ditawarkan oleh bakal calon kandidat yang meramaikan pesta demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menerangkan pemilih pemula sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula sendiri memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum karena secara kuantitatif jumlahnya relatif banyak (Setiajid, 2011). Pada laman KPU menyajikan data komposisi pemilih di Pemilu tahun 2024 berdasarkan generasi yaitu Pre-Boomer yang lahir sebelum 1945, baby Boomer yang lahir pada 1946-1964, Gen X yang lahir di tahun 1965-1980, Generasi Milenial yang lahir di tahun 1981-1996 dan Gen Z yang kategorinya lahir di tahun 1997 dan setelahnya. Jumlah Gen-Z yaitu mereka yang berusia 17 sampai 26 tahun sebanyak 22,85% atau menembus angka 46 juta jiwa.

Selanjutnya, selain jumlah yang banyak, kita juga tidak dapat mengesampingkan potensi yang dimiliki oleh Gen-Z sebagai pemilih pemula. Suara mereka memiliki kemampuan untuk membuat partai baru dapat lolos *parlementary threshold*, dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden serta berpeluang menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia (Soeprapto et al., 2014). Besarnya pengaruh pemilih pemula atau pemilih muda diyakini oleh banyak partai politik dapat menambah jumlah suara, sehingga berusaha untuk menarik suara dipemilihan umum 2024. Strategi mengait suara atau menarik jumlah suara partisipan muda dilakukan dengan strategi media yang dapat menjangkau luas khalayak, seperti melalui platform media-media sosial *Instagram, tiktok, X, youtube, facebook* dan media sosial lainnya. Semua aplikasi tersebut telah dipastikan tersedia di smartphone generasi-Z dan cukup sering digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi sekaligus bertukar informasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan kurang lebih 197 juta atau sekitar 74% populasi di Indonesia menggunakan internet di tahun 2020. Hal ini meningkat disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut, yang mengharuskan siswa-siswi, mahasiswa dan juga karyawan belajar dan bekerja secara daring. Peningkatan tren penggunaan media sosial semakin luas hingga ke pelosok desa. Jangkauan yang luas membuat media digemari oleh hampir semua kalangan dalam mengakses, mencari dan bertukar informasi.

Media berperan cukup besar dalam mempengaruhi opini public dan perilaku politik masyarakat. Media massa bahkan media sosial hadir untuk memberikan informasi terkait isu-isu sosial dan politik dengan perspektif yang berbeda. Beragam isi pesan berita



yang disajikan mulai dari bentuk dukungan yang menyajikan informasi-informasi yang menimbulkan opini negative di kalangan masyarakat sampai kepada berita atau informasi yang sifatnya positif baik yang diterima oleh masyarakat. Untuk itu literasi media dalam memilih berita politik sangat penting bagi masyarakat khususnya pemilih pemula.

Di dalam pelaksanaan pemilihan umum, generasi-Z sebagai pemilih pemula menjadi target dalam kampanye partai politik karena persentase kalangan yang cukup besar. Namun demikian, kendati memiliki jumlah dan potensi yang besar, pada kenyataannya pemilih pemula ialah kategori pemilih yang memiliki pola perilaku sendiri dan sulit diatur serta sulit diprediksi. Kekhawatiran adanya kecenderungan untuk tidak memilih karena bingung banyaknya partai politik yang muncul yang pada akhirnya membuat pemilih pemula tidak memilih sama sekali. Untuk menjangkau pemilih pemula, para pemangku kepentingan dapat menganalisis tipe pemilih pemula. Firmansyah (2008), membagi empat jenis pemilih dalam berbagai tipe; pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. kategori-kategori pemilih tersebut dapat dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan politik.

Maka dari itu, pendidikan politik perlu diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan, namun bukanlah dalam bentuk propaganda politik praktis yang akan mengarah pada proses pembusukan intelektual seperti yang sering kita dapati melainkan pendidikan politik yang sesuai secara ilmiah dan bermoral (Hasan, 2016). Pemahaman politik terkait pemilih pemula khususnya lingkup sekolah menjadi penting untuk dilakukan untuk mendukung proses politik yang demokratis sebagai partisipasi dalam memberikan suara pilihannya kepada calon kandidat yang diyakini dapat mewakili aspirasi. Universitas hadir dalam memberikan literasi politik kepada siswa siswi sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) disuatu daerah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi bersama universitas akan menghasilkan cara yang paling efektif untuk menjangkau generasi muda, sebab generasi muda perlu beberapa pendekatan yang beragam dan berbeda untuk belajar tentang demokrasi dan proses pemilu.

Universitas menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan pendidikan/literasi politik untuk membantu Negara dalam menjunjung sistem demokrasi melalui pemilihan umum kepala pemerintahan dan daerah. Peran Universitas Sulawesi Barat melalui Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat merupakan institusi yang memiliki perhatian terhadap pendidikan politik pada generasi muda sehingga Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat selalu berupaya untuk melakukan penanaman nilai-nilai kearifan dan fatsun politik secara benar melalui dunia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan tujuan memberikan pendidikan politik pemilih pemula kepada siswa. Hal ini dilakukan karena Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat menyadari benar bahwa siswa seharusnya sudah dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi politik di pemilihan

umum presiden dan kepala daerah. Harapannya, kegiatan pendidikan politik pemilih pemula ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan di berbagai sekolah di Sulawesi Barat.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di SMAN 1 Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam dua tahap yaitu: 1.) Pemberian materi pendidikan politik pemilih pemula, 2.) Sharing session. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 65 siswa dan siswi perwakilan kelas 2 dan juga 3 SMAN 1 Tinambung. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam keikutsertaan memberikan hak suaranya bagi siswa dan siswi SMAN 1 Tinambung. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan siswa dan siswi SMAN 1 Tinambung dapat memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik serta dapat berperan serta di pemilihan umum 2024 untuk memberikan suaranya.



Gambar 1 Workshop Literasi politik dengan materi konsep pemilih pemula



Gambar 2 Workshop Literasi Politik dengan materi karakteristik pemilih pemula



Gambar 3 Kegiatan Sharing Session Pendidikan Politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dengan tema “*Pendidikan Politik Pemilih Pemula*” dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di SMAN 1 Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam dua tahap, yakni: 1) Pelaksanaan *Workshop Pendidikan Politik Pemilih Pemula*; 2) *Sharing Session*. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pendidikan pemilih pemula kepada siswa SMAN 1 Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat agar siswa dapat menunjukkan partisipasi yang lebih baik dalam praktek politik kedepannya.

1.) Workshop “Pendidikan Politik Pemilih Pemula”

Pengabdian Masyarakat Mandiri ini diawali dengan kegiatan workshop Pendidikan politik pemilih pemula. Untuk lebih jelasnya terkait kegiatan workshop ini dapat dilihat pada dokumentasi gambar 1 diatas.

Dewasa ini, negara-negara demokrasi di dunia termasuk Indonesia mengalami partisipasi politik yang sangat rendah dari pemilih pemula dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Pemilih di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori : pertama, pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (Yuningsih & Warsono, 2014). Tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik bagi Negara yang menganut system demokrasi, karena dianggap banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008)

Pada hakikatnya, pemilih pemula khususnya remaja memang memiliki nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal serta mencari



kesenangan, oleh karena itu, semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari oleh mereka (Suhartono, 2009). Di Indonesia sendiri, misalnya, Sodikin, et.al. (2013) mencatat jumlah *non-voter* (biasa disebut golongan putih atau golput) yang terutama didominasi oleh kaum muda sebagai pemilih pemula terus meningkat dari pemilu ke pemilu berikutnya; 10,21% pada Pemilu 1999, meningkat menjadi 23,34% pada Pemilu 2004, dan 39,10 % pada Pemilu 2009. Fenomena apatisisme politik ini tentu saja mengkhawatirkan bagi keinginan negara untuk membangun demokrasi yang berkualitas (Loina & Munawaroh, 2018).

Apatis dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu sikap dan perilaku. Apatis dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, tidak percaya terhadap institusi politik dan tidak mau berpartisipasi dalam politik. Sikap dan perilaku seseorang yang tidak peduli dapat ditumbuhkan kembali melalui pemahaman dalam bentuk literasi politik mulai dari usia muda dibangku sekolah. Pendidikan terkait literasi politik khususnya materi pemilih pemula dan karakteristik pemilih pemula diberikan pada siswa agar siswa sejak dini menyadari perannya sebagai generasi muda yang akan ikut berpartisipasi dalam memberikan suara saat pemilihan umum berlangsung sebagai wujud dari demokrasi.

Peran pemilih pemula dalam keikutsertaan atau partisipasi politik sangat diharapkan. Pemilih pemula diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik terutama dalam pemilihan umum. Saat ini, pemilih pemula yang didominasi anak muda generasi-Z (GenZ) memiliki sifat dan karakter, latar belakang dan pengalaman serta tantangan yang berbeda dengan pemilih generasi sebelumnya. Generasi sekarang banyak diterpa oleh teknologi sehingga untuk mengakses informasi khususnya politik jauh lebih cepat melalui media sosial dan platform lainnya. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan kepada siswa dan siswi untuk ikut andil dan tidak bersikap apatis terhadap politik di Negara kita.

Generasi Z menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan yang terjadi dalam negeri yang kurang jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan globalisasi, intervensi internasional dan sebagainya. Persepsi pemilih pemula yang beranggapan bahwa kampanye suatu kegiatan hanya menyita waktu dan berbenturan dengan kegiatan mereka sehari-hari berakibat mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik kendati hal tersebut penting untuk dilakukan. Milbrath dalam (Sastroatmodjo, 1995) menerangkan terdapat empat faktor pendukung pada partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum, yakni: 1) berkenaan dengan penerimaan perangsang politik, bahwa keterbukaan dan kepekaan seorang pemilih melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. 2) karakteristik sosial seseorang, yakni status ekonomi, suku, usia, jenis kelamin dan juga agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi politik. 3) sistem politik dan sistem partai tempat seseorang individu itu hidup cenderung berpengaruh dalam partisipasi politik. 4) perbedaan regional yang merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku seseorang, sehingga mendorong perbedaan politik dan partisipasi politik pemilih.

Selanjutnya, kesiapan pemilih pemula juga menjadi hal penting untuk dibahas. Kesiapan tersebut ditentukan oleh kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilih



dengan maksimal. Artinya dalam menentukan pilihan pemilih benar-benar menganalisis secara cerdas, dengan harapan akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu melaksanakan dan menjalankan amanah dengan baik. Kesadaran tersebut juga tidak bisa lepas dari pendidikan politik. Pendidikan politik memiliki peranan yang sangat penting khususnya bagi pemilih pemula, mengingat pemilih pemula lebih mudah untuk dipengaruhi (Yunita & Nugraheni, 2018). Pendidikan politik bisa diberikan oleh KPU, atau melalui pendidikan formal, misalnya di sekolah dan perguruan tinggi. Ketika pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik, secara tidak langsung ada usaha untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilih pemula untuk menentukan pilihan dengan cerdas. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula harus ditanamkan sedini mungkin, khususnya di lingkungan sekolah agar sedini mungkin generasi muda dapat memahami bahwa pendidikan politik sama pentingnya dengan pendidikan di sekolah. Siswa dan siswi kedepannya juga dapat memahami bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan umum penting untuk mewujudkan negara yang demokrasi.

2.) *Sharing Session* Pendidikan Politik

Tahap kedua dalam pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan *sharing session* pendidikan politik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 bagian metode penelitian.

Sharing Session ini menjadi kesempatan bagi siswa dan siswi untuk memberikan pertanyaan serta mendiskusikan fenomena politik yang selama ini terjadi dan mereka lihat disekitar mereka. Untuk sesi diskusi ini dipandu oleh moderator agar proses diskusi berjalan dengan kondusif. Melalui kegiatan ini juga, pematerei memberikan pemahaman politik yang benar dan kepada siswa.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal dengan kutub yang berbeda. Politik berorientasi kepentingan sedangkan pendidikan justru mengajarkan untuk merangkul semua kepentingan sehingga menjadi seperti tanpa kepentingan, oleh karena itu kedua hal tersebut senantiasa dipisahkan. David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya *Children in the Political System* (1969) memberikan batasan mengenai pendidikan politik yaitu "... development process which persons acquire arientation and paterns of behaviour". Selanjutnya, Fred I. Greenstain dalam jurnalnya yang berjudul *A Note on the Ambiguity of "Political Socialization": Definitions, Criticisms, and Strategies of Inquiry* (1970) menyatakan bahwa "*Political socialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanned, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearing but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquisition of politically relevant personality characteristics*".

Kedua pendapat diatas menerangkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Politik sendiri bagi sebagian besar masyarakat khususnya generasi muda



adalah cara-cara kotor yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mendapatkan kekuasaan. Stigma ini muncul dilatarbelakangi karena Tingkat literasi politik generasi muda yang cukup rendah. Faktor rendahnya literasi politik mulai dari tidak berfungsinya partai politik, politisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap sosial politik dalam memperkuat literasi politik pemilih pemula. Rendahnya literasi politik dapat dimanfaatkan oleh Sebagian oknum politisi untuk melakukan cara-cara licik atau propaganda dalam mencapai tujuannya.

Terlepas dari hal tersebut literasi politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu, namun pendidikan politik juga mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Sejak dini generasi muda harus peduli dengan persoalan bangsa khususnya masalah politik. Mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negerinya. Sudah saatnya para siswa sebagai generasi muda diajarkan dan dituntun untuk memahami berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup rakyat banyak. Generasi muda sebagai pemilih pemula yang memiliki pendidikan politik yang cukup akan mampu memberikan alasan yang rasional dalam menentukan figure pilihannya atau partai tertentu yang menjadi pilihannya. Pengetahuan politik (*political knowledge*) yang dimiliki oleh warga negara secara signifikan mereka akan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan politik baik dalam bentuk konvensional ataupun non-konvensional misalnya memilih, diskusi politik, beropini melalui media atau forum-forum diskusi, orasi, serta petisi (Dudley dan Gitelson, 2010; Milner, 2007).

Pengetahuan terkait literasi politik juga nantinya akan menjadi bekal kepada siswa dan siswi dalam menyaring berita-berita yang diterimanya di media-media sosial miliknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rentan usia siswa dan siswi termasuk kategori pemilih pemula atau mereka adalah generasi-Z, yang kesehariannya banyak diterpa oleh *platform-platform* media sosial. Dengan adanya pemahaman politik yang diberikan, kedepannya mereka dapat lebih kritis dan aktif dalam menentukan berita yang layak dan menyaring berita yang mengandung muatan tidak benar atau *hoax*.

Di Negara dengan system pemerintahan demokrasi, media memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi. Media massa dan media sosial dijadikan perantara oleh partai politik dan juga figure politik sebagai sarana komunikasi. Melalui media khalayak dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah dan stakeholder yang memiliki kepentingan politik. Media menjadi control secara tidak langsung terhadap kinerja pemerintah. Tak hanya itu saja, media berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong generasi muda menyuarakan aspirasinya secara aktif dalam kegiatan politik.

Literasi media penting juga diberikan kepada pemilih pemula sebagai control dalam menilai setiap berita sebelum dikonsumsi. Mencari kebenaran akan berita atau informasi sebelum disebar ke public. Literasi media merupakan kemampuan yang

harus dimiliki oleh generasi muda, seperti kemampuan dalam mengakses informasi melalui media, kemampuan dalam menganalisis serta evaluasi isi pesan yang disajikan media, kemampuan mengembangkan opini terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh media, serta kemampuan dalam bertindak atau memberikan feedback terhadap informasi yang diberikan media-media (Hobbs, 2010)

Dengan adanya *sharing session* pendidikan politik, siswa akan mendapatkan ruang untuk mengungkapkan pendapatnya serta berdiskusi terkait praktik-praktik politik yang mereka lihat disekeliling mereka. Dalam kegiatan ini juga siswa didorong untuk memupuk sikap menghargai pendapat orang lain dengan melakukan pemilihan ketua kelas atau diskusi serta debat yang baik tentang permasalahan bangsa, hal ini diberikan sebagai bentuk pendidikan politik praktis pertama bagi siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan politik bagi siswa di lingkungan sekolah merupakan hal yang penting. Kedepannya diharapkan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memberikan pendidikan politik pemilih pemula yang bernilai moral kearifan dan kesantunan politik bagi siswa serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik terutama dalam partisipasi pemilihan umum.

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya (1) sekolah diharapkan berupaya untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada siswa. Adanya pendidikan politik secara ilmiah dan bermoral yang dapat diterima siswa dan menghasilkan perilaku politik yang baik. (2) Pendidikan politik membantu siswa memahami politik yang berlaku didaerahnya, oleh karenanya, sekolah disarankan untuk melakukan kerjasama dan melaksanakan pelatihan pendidikan kepada guru-guru agar nantinya dapat menyampaikan politik secara benar kepada siswanya.

SARAN

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMAN 1 Tinambing sudah membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Kegiatan ini telah mencapai target sasaran yang ditetapkan oleh tim PKM, tetapi kedepannya target siswa siswi yang mengikuti workshop bisa lebih banyak sehingga manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh seluruh siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 1 Tinambing. Kepada Kepala Sekolah dan jajarannya yang telah menerima kami dengan baik dan memfasilitasi tim pengabdian selama proses workshop berlangsung. Kepada siswa dan siswi SMAN1 Tinambing yang sangat antusias menerima materi dari kami, serta Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat yang mendukung kami dalam setiap program pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Mariam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Jakarta Utama.
- Davis, G., & Althaus, C. (1998). *The Australian Policy Handbook*. London: Routledge.
- Denver, D., & Hands, G. (2009). Science: Does Studying Politics Make a Difference? The Political Knowledge, Attitudes and Perceptions of School Students. *British Journal of Political Science*, 20(2), 263-279. <https://doi.org/10.1017/S0007123400005809>
- Denver, D., & Hands, G. (2009). Science: Does Studying Politics Make a Difference? The Political Knowledge, Attitudes and Perceptions of School Student. *British Journal of Political Science*, 20(2), 263-279. <https://doi.org/10.1017/S0007123400005809>.
- Dudley, r.L., & Gitelson, A.R. (2010). political Literacy, Civic Education, and Civic Engagement: A Return to political Socialization? *Applied Developmental Science*, 6(4), 175-182. <http://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604>.
- Easton, D., & Dennis, J. (1969). *Children in Political System: Origins of Political Legitimacy*. New York: McGraw-Hill.
- Firmansyah. (2008). *Marketing Political: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor indonesia.
- Fred I, G. (1969). *Political Socialization*. New York: Yale Press.
- Halik. (2019). Penerapan Pendidikan Politik bagi Peserta Didik (Suatu Penelitian Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Indra Jaya Pidie). *Jurnal Sains Riset*.
- Hasan, E. S. (2016). The Effects Of Civic Education Learning On Students' Political Literacy In Sma Negeri 2 Purwokerto. *jurnal sosiohumaniora*.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action* Written by. Diakses dari [http:// assets.aspeninstitute.org/Digital_and_Media_Literacy.pdf](http://assets.aspeninstitute.org/Digital_and_Media_Literacy.pdf)
- Indra, K. (13. September 2023). Berita Pemilu. Von Detik.com: <https://news.detik.com/pemilu/d-6928759/puluhan-juta-gen-z-bakal-nyoblos-di-2024-seberapa-besar-efeknya-abgerufen>
- Loina, L., & Munawaroh, Z. (2018). Partisipasi Pemilih Pemula dalam dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. *Jurnal Aspikom*.
- Setiajid. (2011). Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Plihnya pada Pemilihan Wakilota Semarang pada Tahun 2010. *Integralistik*.
- Sodikin, Amir, & Wisnu, N. (25. Oktober 2013). *Demokrasi Era Digital: Mengejar Generasi Pedas, Lekas dan Bergegas*. Von Kompas Daily. abgerufen
- Soeprapto, A., Susilati, D., & Basuki, A. (2014). Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Yuningsih, N. A., & Warsono. (2014). Partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada Pemilukada Mojokerto tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.
- Yunita, E., & Nugraheni, A. (2018). Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*.